



**PENENTUAN LOCUS DELICTIE DALAM CYBER CRIME
SEBAGAI USAHA PEMBAHARUAN HUKUM
PIDANA NASIONAL**

TESIS

MELY DIANA

1510922048

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

2018



**PENENTUAN LOCUS DELICTIE DALAM CYBER CRIME
SEBAGAI USAHA PEMBAHARUAN HUKUM
PIDANA NASIONAL**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum**

MELY DIANA

1510922048

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

2018

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah benar hasil karya sendiri, bukan merupakan tiruan atau duplikasi dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.

Demikian pernyataan saya buat dengan sebenar- benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Nama : Mely Diana
NRP : 1520922048
Tanggal : 20 Januari 2018

Jakarta, 20 Januari 2018

Yang Menyatakan,



Mely Diana

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta,
saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mely Diana
NRP : 1520922048
Fakultas : Hukum
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non Eksklusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **PENENTUAN LOCUS DELICTIE DALAM CYBER CRIME SEBAGAI USAHA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL**

Beserta perangkat yang ada. Dengan hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta berhak menyimpan dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 20 Januari 2018

Yang menyatakan



Mely Diana

PENGESAHAN

Tesis yang diajukan oleh :

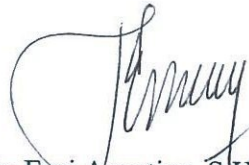
Nama : Mely Diana

NRP : 1520922048

Program Studi : Magister Hukum

Judul Tesis : PENENTUAN LOCUS DELICTIE DALAM CYBER
CRIME SEBAGAI USAHA PEMBAHARUAN HUKUM
PIDANA NASIONAL

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.



Dr. Erni Agustina, S.H., Sp.N
Ketua Penguji



Dr. Arrisman, SH, MH
Penguji I / Pembimbing



Dr. Moh. Hatta, SH, M.Kn
Penguji II/ Pembimbing



Dwi Desi Yanti Manna, S.H., M.H.
Dekan



Dr. Erni Agustina, S.H., Sp.N
Ka. Prodi

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 20 Januari 2018

PENENTUAN LOCUS DELICTIE DALAM CYBER CRIME SEBAGAI USAHA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL

MELY DIANA

ABSTRAK

Kejahatan-kejahatan cybercrime dapat berupa hacking, cybersquatting, pornografi, dan lain sebagainya. Cybercrime memiliki kompleksitas tersendiri ketika pemeriksaan pengadilan mengharuskan adanya suatu locus delicti yang jelas. Locus delicti juga penting untuk menentukan keberlakuan hukum, yurisdiksi atau kompetensi relatif. Padahal dalam kasus-kasus cybercrime, penentuan locus delicti tidak sesederhana pada kasus-kasus kejahatan tradisional. Dalam Pasal 151 KUHAP di atas, maka Hakim Pengadilan Tinggi maupun Hakim Agung harus mempunyai pertimbangan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan ketika memutuskan suatu sengketa wewenang mengadili. Dasar pertimbangan ini tidak terlalu rumit jika permasalahan hukum yang sedang ditangani dapat didasarkan pada pasal 84 ayat (1) KUHAP, yaitu locus delicti yang jelas dan pasti. Namun demikian, permasalahan menjadi tidak sederhana pada saat penentuan locus delicti diperlukan guna memeriksa kasus-kasus cybercrime. Sedangkan dalam berbagai kasus cybercrime hampir selalu terdapat perbedaan antara lokasi (locus) pelaku dengan lokasi akibat yang ditimbulkan. Tujuan dari penelitian ini adalah 1. Mengetahui ketentuan hukum Indonesia mengatur tentang tempus dan locus delicti dalam kejahatan cybercrime. 2. Memahami pengaturan kewenangan pengadilan yang berhak mengadili kasus cybercrime. 3. Memahami urgensi serta kedudukan pembaharuan hukum pidana di Indonesia menyangkut cybercrime dari kebijakan kriminal. Dengan metode penelitian normative yuridis diketahui bahwa 1.

Ketentuan hukum Indonesia mengatur tentang tempus dan locus delicti dalam kejahatan cybercrime dipengaruhi oleh asas legalitas dalam hukum Pidana. Disamping itu tempus dan locus delicti ditentukan oleh empat teori yang dapat digunakan yaitu : Teori perbuatan materiil, Teori akibat, Teori instrumen dan Teori gabungan. Tempus dan locus delicti juga dapat menentukan hal lain seperti kewenangan relatif pengadilan, pertanggungjawaban, daluwarsa dan lain sebagainya. 2. Pengaturan kewenangan pengadilan yang berhak mengadili kasus cybercrime Pengadilan Negeri hal ini berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP yang yang intinya berisi Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya, dan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan dan ditahan, dan sebagian besar tempat kediaman saksi-saksi. 3. Urgensi serta kedudukan pembaharuan hukum pidana di Indonesia menyangkut cybercrime dari kebijakan kriminal harus melihat alasan penting dalam rangka penyusunan hukum nasional, yaitu alasan politik, alasan sosiologis dan alasan praktis.

Kata Kunci : Locus Delictie, Cybercrime, Pidana

DETERMINATION OF LOCUS DELICATE IN CYBER CRIME AS AN EFFORT TO RENEWAL OF NATIONAL CRIMINAL LAW

MELY DIANA

ABSTRACT

Cybercrime crimes can be hacking, cybersquatting, pornography, and so on. Cybercrime has its own complexity when a court examination requires a clear locus delicate. Locus delicate is also important to determine the applicability of law, jurisdiction or relative competence. Whereas in cybercrime cases, locus delicate determination is not as simple as in traditional criminal cases. In Article 151 of the Criminal Procedure above, the High Court Judge as well as the Supreme Court must have a legally accountable judgment when terminating a dispute over the authority to hear. The basis of this consideration is not too complicated if the legal issue being addressed can be based on Article 84 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, the clear and definite locus delicate. However, problems are not simple at the time of locus delicate determination necessary to examine cybercrime cases. Whereas in many cases cybercrime almost always there is a difference between the location (locus) of the offender with the location as a result. The purpose of this research is 1. To know the provisions of Indonesian law to regulate the tempus and locus delicate in the crime of cybercrime. 2. Understand the regulation of the jurisdiction of the court that is entitled to adjudicate the cybercrime case. 3. Understanding the urgency and status of criminal law reform in Indonesia regarding cybercrime from criminal policy. By normative juridical research method is known that 1. The provisions of Indonesian law regulate the tempus and locus delicate in cybercrime crime is influenced by the principle of legality in the Criminal law. Besides the tempus and locus delicate is determined by four theories that can be used are: Theory of material deeds, Theory of consequence, Instrument theory and Theory combined. Tempus and locus delicate can also determine other things such as the relative authority of the courts, accountability, expiration and so forth. 2. The jurisdiction of the court authority entitled to adjudicate the cybercrime case of the District Court is based on Article 84 of Law Number 8 of 1981 on the Criminal Procedure Code which essentially contains the District Court having the authority to hear all matters concerning criminal acts committed within its jurisdiction and the State Court the legal area of the defendant resides, dwells last, where he is found and detained, and most of the witnesses' residence. 3. Urgency and status of criminal law reform in Indonesia concerning cybercrime of criminal policy should see important reason in the framework of drafting national law, namely political reasons, sociological reasons and practical reasons.

Keywords : Locus Delicate, Cybercrime, Criminal

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki penulis, untuk itu penulis mengharapkan segala kritik dan saran untuk memperbaiki, menyempurnakan tesis yang berjudul :

“PENENTUAN LOCUS DELICTIE DALAM CYBER CRIME SEBAGAI USAHA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL”

Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dengan ketulusan hati kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan ini dengan memberikan bantuan moril dan dorongan semangat. kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Eddy S. Siradj. MSc., Eng selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.
2. Ibu Dwi Desi Yayi Tarina, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran “ Jakarta.
3. Ibu DR. Erni Agustina, SH, Sp.N, selaku Ketua Program Pendidikan Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
4. Dr. Moh. Hatta. SH, M.Kn, selaku Pembimbing I.
5. DR. Arrisman, SH., MH selaku Pembimbing II.
6. Dosen Penguji, Para Dosen, Para Staf dan seluruh Pihak yang telah membantu sejak awal perkuliahan sampai dengan perbaikan Tesis.
7. Seluruh rekan-rekan penulis baik di Teman – temaan di Kejaksaan maupun di kampus Universitas Pembangunan Nasional- UPN "Veteran" Jakarta.
8. Seluruh rekan-rekan Advokat, Polisi, Jaksa dan pihak-pihak yang tidak bias saya sebutkan satu persatu.
9. Yang terutama penulis ucapkan terima kasih yang mendalam pada keluarga tercinta yang selalu memberikan semangat, doa serta perhatian.

Akhir kata, penulis berharap semoga tesis dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi yang membaca pada umumnya.

Jakarta, 20 Januari 2018

Mely Diana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
I.1.Latar Belakang.....	1
I.2. Perumusan Masalah	5
I.3.Tujuan Penelitian	5
I.4. Manfaat Penelitian	5
I.5. Kerangka Teoritis dan Konseptual	6
I.5.1. Kerangka Teoritis	6
I.5.2. Kerangka Konsep	15
I.6. Sistematika Penulisan	16
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	18
II.1.Cyber Crime	18
II.1.1.Pengertian Cyber Crime dan Perkembangannya.....	18
II.1.2. Bentuk dan Jenis Cyber Crime	20
II.1.3. Sasaran Cyber Crime.....	23
II.1.4. Pengaturan dan Kebijakan Cyber Crime Dalam Hukum Pidana	25
II.2.Tempus Delicti dan Locus Delicti.....	29
II.2.1. Tempus Delicti	29
II.2.2. Locus Delicti	32
II.3.Yurisdiksi Dalam Tindak Pidana Melalui Sistem Elektronik	34
II.4.Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana.....	38

BAB III. METODE PENELITIAN	47
III.1. Tipe Penelitian	47
III.2. Sifat Penelitian	47
III.3. Sumber Data.....	47
III.4. Metode Pengumpul Data.....	48
III.5. Metode Analisis data.....	49
BAB IV. KETENTUAN TENTANG TEMPUS DAN LOCUS DELICTI DALAM CYBER CRIME	50
IV.1. Ketentuan Tempus dan Locus Delicti Dalam Cyber Crime	50
IV.1.1.Tempus Delicti	50
IV.1.2.Locus Delicti.....	58
IV.2.Pengaturan Kewenangan Pengadilan Yang Berhak Mengadili Kasus Cyber Crime	69
IV.3.Urgensi Serta Kedudukan Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia Menyangkut Cyber Crime Dari Kebijakan Kriminal.....	79
BAB V. PENUTUP	112
V.1. Kesimpulan	112
V.2.Saran	113

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP